

**IMPLEMENTASI BUMN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI BALI**

Made Widani

Email: wida.bima@gmail.com

Universitas Maendradatta, Denpasar Bali

Abstrak-Dalam situasi Pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, khususnya di Bali, bukan saja sektor pariwisata yang terdampak, akan tetapi juga terhadap semua industri di Indonesia baik sektor swasta ataupun pemerintah. Dalam hal ini pihak BUMN pun sangat merasakan dampak virus yang memporak porandakan perekonomian dunia. Namun demikian BUMN masih inten melakukan program perduli dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility dimana merupakan komitmen perusahaan BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di provinsi Balidan juga merupakan salah satu bentuk keperdulian pemerintah yang dilaksanakan melalui perusahaan BUMN dalam penyaluran dana serta bantuan baik secara materi maupun non materi kepada masyarakat untuk meningkatkan dan membantu permasalahan perekonomian.

Abstract-In the situation of the Covid-19 Pandemic that is still engulfing the world, especially in Bali, it is not only the tourism sector that is affected, but also all industries in Indonesia, both the private and government sectors. In this case, the SOEs also feel the impact of the virus that has ravaged the world economy. However, SOEs are still intent on carrying out a caring program in improving the welfare of the community in the form of implementing Corporate Social Responsibility which is a commitment by BUMN companies to improve the welfare of the community, especially in the province of Bali and is also a form of government concern that is carried out through BUMN companies in distributing funds and assistance both physically and mentally. material and non-material to the community to improve and help economic problems.

Kata Kunci: *BUMN, Corporate Social Responsibility , Kesejahteraan*

I.PENDAHULUAN

Dalam situasi Pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, khususnya di Bali, bukan saja sektor pariwisata yang terdampak, akan tetapi juga terhadap semua industri di Indonesia baik sektor swasta ataupun pemerintah, dalam hal ini pihak BUMN pun sangat merasakan terdampak virus yang memporak porandakan perekonomian dunia. Walaupun kondisi saat ini masih belum stabil normal seperti sebelum pandemic namun mengacu kepada kearifan lokal yang berisi pesan-pesan sosialisasi, penyebaran nilai-nilai budaya, Pendidikan dan kontrol sosial yang disampaikan melalui media komunikasi atau media sosial di mana kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menjadi konsen bagi pemerintah. Berkaitan dengan kesejahteraan yang mana perusahaan milik Negara masih memberikan kontribusi sosial dan lingkungan terhadap masyarakat yang tertuang dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan (Kotler & Nancy 2005,) CSR juga merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah yang dilaksanakan melalui perusahaan BUMN dalam penyaluran dana serta bantuan non materi untuk masyarakat untuk meningkatkan dan membantu

permasalahan perekonomian masyarakat. Beberapa tahun terakhir Dewan Perwakilan Daerah Bali yang dimulai pertama kali tahun 2018 mengadakan Program CSR Award yang di gagas oleh Bapak Senator DPDRI utusan Bali Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MSW III SE (MTRU) dimana bertujuan untuk mengapresiasi kepada lembaga BUMN yang ada di provinsi Bali terkait dengan program program dan penyaluran Bantuan atau yang sering diistilahkan dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pelaksanaan program ini diharapkan untuk menstimulus atau meningkatkan minat secara khusus kepada pihak BUMN untuk melaksanakan program CSR setara berkesinambungan dan berkelanjutan serta kedepannya dari pihak perusahaan swasta juga lebih tergugah untuk melaksanakan program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana dilaksanakan program visitasi untuk mengkonfirmasi pemaparan pelaksanaan CSR yang sudah dilakukan dengan acuan beberapa indikator dalam penilaian yang bernafaskan kontek ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, *social media*, *hospitality* dan *Covid-19*. Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat, baik ke arah negatif maupun positif. Dengan demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif, karena hal tersebut dapat

memicu konflik dengan masyarakat, yang selanjutnya dapat mengganggu jalannya perusahaan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul akibat berdirinya suatu kawasan industri, mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada publik khususnya masyarakat di sekitar wilayah perusahaan melalui aktivitas yang nyata sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR, perusahaan harus berhati-hati dan dilakukan dengan cara-cara yang benar agar tidak memperkuat kondisi relasi ketergantungan dari masyarakat akan kehadiran perusahaan.

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) yang mana sebagian besar sahamnya adalah milik Negara dan merupakan bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dalam bagian berdikari daam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu

bangsa. Dalam kegiatan ekonomi dimana BUMN dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dimana tertuang dalam pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud serta tujuan berkontribusi dalam menyumbangkan perannya dalam hal pengembangan perekonomian nasional pada umumnya, dimana salah satunya di wujudkan dalam bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mengutip dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan kata lain CSR merupakan suatu kewajiban dimana perlunya pengalokasian dan menganggarkan dana untuk membiaya kegiatan yang berhubungan dengan social dan lingkungan. Berbicara tentang lingkungan dan kehidupan sosial banyak fenomena yang kita liat diantaranya permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan kita yang bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari

beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusia nya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya. Sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi yang membutuhkan perhatian bagi kita sebagai pemanfaat dan hidup dari lingkungan hidup yang perlu kita carikan solusi yang tepat untuk mengatasinya, begitupun fenomena social yang bisa kita amati dimasyarakat salah satunya masalah ekonomi yang terjadi dalam bentuk fenomena kepadatan penduduk, banyaknya beragam jenis pengangguran, dan kemiskinan yang mana merupakan masalah kita bersama dalam hal ini pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi mencari solusi untuk menjawab fenomena dengan mewujudkan kesejahteraan bersama. Khususnya di Bali disituasi pariwisata yang sedang terpuruk diakibatkan serangan virus mematikan sektor pariwisata yang merupakan sumber hidupdari sebagian besar orang di Bali.

Dilansir dari Harvard Business Review, dimana tujuan utama dari CSR adalah menyelaraskan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan dan nilai bisnisnya dan CSR berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekitar serta menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. Dalam konteks kesejahteraan dimana perusahaan dituntut untuk tidak hanya memikirkan keuntungan

finansial bagi kepentingannya sendiri dan seluruh bagian yang terlibat di dalamnya, akan tetapi juga kepada masyarakat luar, terutama di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal inilah CSR atau *Corporate Social Responsibility* lahir dimana program ini wajib dimiliki Perusahaan level menengah hingga besar sebagai bentuk kontribusi pada negara dan masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang biasanya diimplementasikan dalam bentuk bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, beasiswa pelajar dsb.

Kesejahteraan merupakan isu utama dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini BUMN selalu diwajibkan untuk mendukung program program yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat umum baik ekonomi, kesehatan serta pendidikan secara berkelanjutan atau *sustainability*. Untuk mewujudkan cita cita Presiden Joko Widodo dalam programpembangunan Nawacitayang dipaparkan dalamrencana pembangunan Nasional yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dimana Nawacita merupakan strategi khusus pemerintahan Jokowi yang diawali dengan pembentukan *action plan* yang menjadi acuan pengimplementasian program ditinjau dari perspektif

kepentingan nasional bangsa dalam konteks kepentingan terhadap pencapaian perekonomian rakyat secara merata. sebagai upaya dukungan atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya pengembangan desa desa terpencil dan pelosok peosok nusantara.

Bentuk CSR biasanya dilakukan dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga lingkungan hidup, sosial maupun budaya, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum atau kesehatan, serta memberikan bantuan yang mana fungsinya yaitu sebagai suatu bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat atau terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas apa yang menjadi aktivitas perusahaan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi *Social license to operate* yaitu perusahaan bisa berkembang atau tidak akan sangat dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sekitar tempat usaha yang memperoleh manfaat dari perusahaan dimana hal ini adalah hubungan timbal balik dimana masyarakat akan loyal dengan perusahaan tersebut, disampingitu fungsi lain yang di dapat perusahaan adalah untuk melebarkan akses sumber daya, jika CSR perusahaan bila dikelola dengan baik akan memberikan

keuntungan bagi perusahaan. Diantaranya adalah meningkatkan daya saing perusahaan dan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan serta untuk melebarkan akses menuju pasar, dimana program CSR sebenarnya seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan bisa menjadi sebuah potensi untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan besar lagi serta bisa membangun loyalitas konsumen yang bertujuan menembus target pasar yang baru.

Menurut Laporan Bank Indonesia dimana, kInerja perekonomian Bali pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi di tengah pandemi COVID-19. Ekonomi Bali dengan output rill sebesar Rp35,86 triliun tercatat tumbuh sebesar -10,98% (yoy) pada triwulan II 2020, lebih rendah dibanding dengan triwulan I 2020 yang sebesar -1,14% (yoy) dan juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional periode yang sama, sebesar -5,32% (yoy). Pangsa ekonomi Bali terhadap nasional di triwulan II 2020 sebesar 1,48%, sedikit lebih rendah dibanding dengan triwulan sebelumnya (1,54%). Dari sisi permintaan, kontraksi kinerja ekonomi Bali pada triwulan laporan bersumber dari kontraksi seluruh komponen. Hal ini disebabkan oleh penurunan kinerja pariwisata Bali akibat pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai negara melakukan kebijakan travel restriction dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah

Indonesia sudah melakukan larangan sementara bagi warga negara asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia sejak 2 April 2020

Penurunan kinerja pariwisata kemudian berdampak pada penurunan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan tertahannya sumber pendapatan utama rumah tangga. Konsumsi pemerintah juga tertahan seiring dengan penurunan pagu belanja ditengah pendapatan pemerintah yang tertahan akibat menurunnya kinerja pariwisata. Sejumlah proyek investasi juga tertahan ditengah pandemi COVID-19 dengan perlunya penerapan physical distancing. Selanjutnya, ekspor luar negeri juga kontraksi akibat penurunan jumlah kunjungan wisman dengan adanya larangan sementara bagi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia

Dari sisi penawaran, membaiknya kontraksi ekonomi Bali pada triwulan III 2020 bersumber dari melambatnya kinerja hampir seluruh lapangan usaha utama dan diperkirakan akan membaik dibanding dengan triwulan sebelumnya didorong oleh potensi kinerja pariwisata domestik serta berpotensi membaik seiring dengan upaya Pemerintah Daerah Bali untuk mendorong implementasi protokol kesehatan pada pelaku usaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang. Hal tersebut dilakukan melalui sertifikasi Clean, Healthy, Safety, Environment (CHSE) pada pelaku usaha pariwisata (hotel, daerah tujuan pariwisata, biro

perjalanan). Pemerintah Daerah Bali bekerjasama dengan Kemenparekraf telah membentuk tim verifikasi untuk melakukan sertifikasi tersebut. Kemudian, kinerja Perdagangan membaik didorong oleh normalisasi jam operasional pusat perdagangan (mall, pasar, restaurant) seiring dengan penerapan tatanan kehidupan era baru Bali. Selain itu, kinerja Pertanian juga diperkirakan membaik pada triwulan III 2020 didorong oleh berlangsungnya musim panen tanaman perkebunan seperti kakao dan cengkeh. Disisi lain, kinerja LU Konstruksi diperkirakan mengalami kontraksi yang sedikit lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pengerjaan beberapa proyek konstruksi yaitu bandara dan hotel yang tertunda. Dalam fenomena yang terjadi saat ini diharapkan peranan BUMN dalam pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di Bali.

II. PEMBAHASAN

Dalam mengimplementasikan amanat undang undang tersebut perusahaan perusahaan BUMN melaksanakan kewajiban dalam berkontribusi dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya yang berada di provinsi Bali dengan memberikan bantuan berupa program CSR yang mana mengandung nilai etis dan filantropis dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan

merupakan komitmen perusahaan dalam menciptakan suatu pembangunan yang dapat berkelanjutan (*Sustainable development*) serta upaya untuk mewujudkan *good corporate governance, good corporate citizenship and good business ethics*.

Berbagai aktivitas korporasi membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia baik itu terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan. Terjadinya deforestasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung terus-menerus hingga akhirnya muncul konsep tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR. Gagasan CSR menekankan bahwa tanggungjawab perusahaan bukan lagi mencari profit semata, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, ketergantungan pada kesehatan keuangan tidaklah menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Program CSR dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal yang didasarkan pada kebutuhan riil yang secara dialogis dikomunikasikan dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, masyarakat dan akademisi. Berbagai penelitian terdahulu telah menghasilkan simpulan yang berbeda atas hubungan peranan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha milik Negara ataupun Swasta terhadap

kesejahteraan masyarakat. Hasil dan bukti berbeda pada suatu daerah yang menerima bantuan berupa CSR khususnya dari BUMN tergantung dari kebutuhan daerah daerah tersebut.

Badan Usaha Milik Negara

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2003 BUMN adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sesuai dengan implementasi strategi pembinaan, jumlah BUMN terus mengalami perubahan untuk mengoptimalkan kontribusi terhadap perekonomian Bangsa Indonesia. Mengacu pada strategi pemerintah jangka panjang maka BUMN dikelompokkan kedalam kluster-kluster sesuai *value chain* dan *core business* masing-masing untuk meningkatkan penguatan rantai nilai dan efisiensi. Dalam Pembangunan Indonesia maju sesuai dengan motto BUMN berkomitmen dalam membangun Indonesia. Berkontribusi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Berjuang bersama, gotong royong, untuk Indonesia serta berkomitmen mengimplementasikan AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian

nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta berperan dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional

penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu persero dan perum beserta pengertian arti definisi Persero Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Organ persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umum pemegang saham. Contoh persero yaitu : PT Angkasa Pura, PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, PT Perkebunan Nusantara V, PT. JASINDO, PT TASPEN, PT.ASKRINDO dan lain-lain. b. Perum / Perusahaan Umum

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Organ perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi. Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, Bulog dan lain-lain.

Salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi, tentunya BUMN akan berperilaku pula sebagai layaknya perusahaan pada umumnya yang juga berorientasi pada pencapaian keuntungan atau laba. BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sebagai korporasi, BUMN memiliki tuntutan peran sedemikian. Namun pada sisi lain BUMN pun dituntut memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitarnya.

Sesuai amanat undang-undang menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil menengah atau koperasi, dimana BUMN

memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan UMKM disamping itu mengacu amanat undang undang nomer 19 tahun 2003 terkait dengan *Corporate Sosial Responsibility* dari BUMN yang mana di dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban. Perusahaan menganggarkan biaya untuk mensupport program kemitraan dan juga bina lingkungan (BKBL) yang dimana aturannya mewajibkan penyisihan keuntungan dari BUMN

Mengacu program yang tersirat dalam undang undang, DPD RI membuat inisiasi untuk mengapresiasi serta meningkatkan kontribusi BUMN dalam penyaluran bantuan berupa CSR maka DPDRI provinsi Bali mengadakan program BUMN CSR Award yang dilaksanakan setiap tahun yang mana dimulai perdana pada tahun 2018 yang pertama kalinya di gagas di provinsi Bali oleh Bapak Senator DPDRI utusan Daerah Bali yang mana program tersebut mendapat apresiasi positif dari BUMN pusat dan juga masyarakat. BUMN CSR Award diikuti sekitar 27 BUMN yang ada di provinsi Bali, dengan team penilai BUMN CSR Award terdiri dari praktisi dan akademisi yang dibentuk secara independen dibawah program DPD. Penilaian dilakukan dengan melaksanakan *assessment* ke seluruh Kantor BUMN yang mengikuti program Award.

Dalam kunjungan *assesment* tersebut dilaksanakan proses penilaian dari pemaparan pimpinan

pihak BUMN dari kegiatan CSR baik yang sudah dilaksanakan dengan menunjukan dokumentasi serta penjelasan kegiatan serta memaparkan *planning program* ke depan yang akan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan CSR, berdasarkan pemaparan dari pihak BUMN maka para dewan juri akan memberikan pertanyaan pertanyaan terkait dengan program BUMN CSR yang dilaksanakan untuk mengkonfirmasi dan melakukan penilaian, yang mana penilaian tersebut didasari dari beberapa indikator yang tahun 2018 sampe 2020 yaitu Indikator Ekonomi, Sosial dan Indikator Lingkungan dan ditahun 2021 ini karena pertimbangan mengikuti serta menyesuaikan situasi terkini serta terupdate yang terjadi di masyakat maka indikator penilaian bertambah menjadi 7 indikator yang mana seperti tersebut diatas sebelumnya hanya 3 indikator, dimana indicator tambahan tersebut yaitu indikator hukum, hospitality, sosial media serta Covid-19, dimana tambahan indikator hukum untuk mengkonfirmasi apabila terjadi permasalahan yang terkait dengan hukum apakah ada pemberdayaan LBH lokal Bali untuk menangani kasus kasus terkait kemudian untuk Indikator hospitality dimaksudkan untuk mengkonfirmasi apakah BUMN sudah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam kegiatan perusahaan sehari hari yang berhubungan dengan pelayanan jasa, dan juga mengingat dijamin sekarang yang dipenuhi kaum

milennial yang tidak terlepas dari gadget maka dipandang perlu untuk membentuk indikator sosol media yang mana segala kegiatan CSR bisa di upload di media sosial yang sangat marak saat ini seperti *Instagram* dan *Facebook* yang mana juga mempunyai dampak positif dalam hal mempromosikan perusahaan di kalangan masyarakat dalam hal memerikan informasi dimana BUMN yang ada di Bali sudah ikut berkontribusi dalam program meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang perekonomian yang dilaksanakan dengan pemberian bantuan serta mensupport kebutuhan usaha usaha masyarakat sehingga dapat memberikan edukasi dan menstimulus keinginan masyarakat untuk berusaha dalam meningkatkan taraf hidup serta apresiasi dalam bentuk hubungan yang menjadi bagiandari konsep tri hita karena dalam kehidupan bermasyarakat di Bali dan memiliki dampak positif juga untuk kelanjutan perusahaan untuk mengembangkan usaha serta kelancaran berusaha yang terkait dengan hubungan BUMN dngan masyarakat dilingkungan terkait, dan yang terakhir adalah indikator dari Covid-19, dimana team juri akan mengkonfirmasi apakah perusahaan BUMN sudah melaksanakan protocol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga baik seluruh pegawai yang ada di daam lingkungan perusahaan maupun para tamu atau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan yanga datang ke lingkungan kantor BUMN serta

menyediakan fasilitas prokes untuk melindungi masyarakat serta mencegah penyebaran virus Covid - 19 yang dampaknya saat ini masih kita rasakan yang memporak porandakan perekonomian di Bali yang mana sangat bertumpu dari sektor pariwisata dengan segala regulasi yang menghambat gerak wisatawan untuk berkunjung ke Bali untuk berwisata. Kemudian setelah dilaksanakan proses konfirmasi melalui program visitasi selesai maka akan diadakan rapat pleno oleh team dewan juri yang akan dilaporkan ke DPD Bali sehingga menghasilkan nilai yang mana katagori penilaian akan di *cluster* dalam tiga katagori yaitu Bronze, Silver dan Gold dan jika 3 kali berturut tur mendapatkan Gold maka sudah akan berha mendapat katagori Platinum.

Dalam kegiatan ini selain merupakan ajang bergengsi bagi BUMN karena sudah mendapat penghargaan melalui BUMN CSR AWARD disisi lain secara otomatis juga membranding image perusahaan dimata masyarakat. *Branding* adalah salah satu hal penting yang harus dibangun oleh sebuah bisnis di era globalisasi. Hilangnya batasan membuat persaingan usaha juga semakin ketat. Perusahaan atau bisnis yang berasal dari luar negeri dapat berdiri di Indonesia. Bahkan tidak hanya satu dua saja jumlahnya tetapi banyak, oleh karenanya sebagai pelaku usaha harus memiliki dan membangun *brand* dari usaha bisnis yang dijalankan karena sebuah *brand* yang kuat dapat dengan mudah dikenal oleh

konsumennya sehingga banyaknya pesaing tidak berpengaruh jika *brand* dari perusahaan sudah kuat. Berkaitan dengan BUMN Award melalui publikasi yang dilakukan oleh media, merupakan ajang promosi dikalangan masyarakat akan lebih familiar dengan kontribusi serta upaya yang sudah dilaksanakan BUMN baik dalam bidang Ekonomi, Sosial, pemeliharaan Lingkungan serta kontribusi BUMN terhadap Kesehatan dan Pendidikan yang merupakan part penting dalam katagori meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Seperti yang dipaparkan dalam sambutan Senator DPD/ MPR RI atas pelaksanaan BUMN Award Provinsi Bali, sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo bahwa BUMN tidak boleh hanya melakukan pendekatan *Business to Business*, tetapi harus membantu visi bangsa dan Negara khususnya program Nawa Cita da Tri Sakti Bung Karno. Dalam himbauan DPD RI yang mana peran BUMN d daerah untuk ikut membantu perekonomian daerah di samping fungsinya sebagai lembagamilik bangsa sesuai denganacuan dan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Unndang Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait dengan CSR dari BUMN yang merupakan suatu kewajiban. Terkait dengan penyaluran CSR di provinsi Bali sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno yakni berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang

Budaya. Terkait juga dengan BUMN CSR Award yang disampaikan oleh anggota DPDRI di Provinsi Bali yang disesuaikan dengan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 sebagaimana tugas, fungsi dan wewenang dalam siding pariprna DPDRI dan juga Rapat DengarPendapat Umum (RDPU) dengan MENTERI bumN Pusat, sehingga kepada seluruh BUMN yang ada di Balidalam penyaluran CSR bisa transparansi danalokasi disesuaikan dengan revenue dan sasaran mengingat BUMN bereran penting dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Bali khususnya di stuasi era baru setelah Pandemi Covid-19 sehingga kedepannya dapat terwujud Nawa Cita Jokowi dan Tri Sakti Bung Karno.

Terkait dengan hal tersebut diatas dimana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah respond sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitaryang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbai kegiatan, serta kegiatan tersebut dapat diimplementasikan dengan berbagai bentuk seperti menjaga lingkungan sekitarnya, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengandengan memberikan bea siswa kepada anak yang kurang mampu atau mengapresiasi anak anak yang berprestasi dengan bekerja sama dengan instansi instansi pendidikan terkait. Fungsi CSR secara umum adalah sebagai suatu bentuk

tanggung jawab perusahaan terhadap pihak yang terlibat atau terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas apa yang menjadi aktivitas perusahaan. Dengan adanya peraturan Undang-Undang seperti tersebut diatas program CSR yang semula dilakukan BUMN juga bisa dilakukan oleh perusahaan swasta. Setiap perorangan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan atau Perseroan. Kebijakan tersebut juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban yang mana dalam peraturan tersebut terdapat kegiatan program yang bermacam ragam, tidak hanya terbatas pada program sosial dan ekonomi saja tetapi juga di bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, pemeliharaan lingkungan, kesehatan serta Kebudayaan.

Dalam kajian budaya merupakan hal penting dalam komunikasi. Menurut Dissnayake (2003:17) menyebutkan bahwa budaya tanpa komunikasi tidak dapat berafas karena semua proses komunikasi terdapat konteks konteks budaya. Bahkan Hall (dalam Gudykuns & Lee, 2002) mengatakan bahwa *communication is culture, culture is communication*. Dalam hal ini budaya adalah suatu tata cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi

yang terwujud dalam bentuk perilaku, sistem gagasan dan ideology. Budaya memiliki kemampuan menghadapi pengaruh sosial hidup masyarakat. Dalam kaitannya dengan komunikasi yang efektif dalam hal ini antara BUMN dengan masyarakat di sekitar perusahaan yang diimplementasikan melalui program CSR maka dapat terpenuhi melalui praktisi *public relations* memenuhi peran sebagai antropolog sosial yang mampu memahami budaya di sekitar organisasinya. Komunikasi dapat membangun persepsi positif atau negatif perusahaan dan dapat menjadi realias.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Dikutip dari Investopedia, CSR adalah model bisnis yang membantu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan juga kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar perusahaan. CSR sendiri muncul karena perusahaan menyadari dampak dari operasional bisnis mereka terhadap masyarakat, baik dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan. CRS adalah aspek penting dalam keberlangsungan perusahaan, dimana seperti yang kita ketahui sebuah perusahaan khususnya perusahaan besar seringkali menimbulkan berbagai potensi kerusakan alam dan lingkungan dari dampak produksi atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan disekitar lingkungannya.

Perusahaan yang menguntungkan dalam jangka panjang adalah perusahaan yang

beroperasi serta mengacu pada prinsip yang berkelanjutan dimana perusahaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan daerah dimana perusahaan itu berada. Menurut Adewale, 2012 CSR dipandang sebagai komitmen perusahaan untuk meminimalkan atau menghilangkan efek berbahaya dan memaksimalkan dampak yang menguntungkan secara jangka panjang terhadap masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cerminan hubungan perusahaan sehingga mampu mencerminkan kualitas dari perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di provinsi Bali secara merata dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka sehingga berubah menjadi pendapatan untuk mencapai kemakmuran suatu negara, usaha peningkatan pendapatan nasional merupakan suatu keharusan. Namun, usaha peningkatan pendapatan nasional harus disertai dengan pengendalian pertumbuhan penduduknya karena akan menimbulkan isu-isu yang mencakup permasalahan inflasi, pengangguran, produk domestik bruto (GDP) suku bunga, nilai tukar, serta pendapatan. Meskipun pertambahan pendapatan nasional besar, tetapi pertambahan penduduknya juga besar, maka pendapatan perkapitanya akan tetap kecil. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat adalah

segala upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya. Secara maksimal untuk bertahan untuk mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang social, ekonomi, agama, dan budaya. Untuk mewujudkan kesejahteraan maka semua pihak harus bekerja sama bergandeng tangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang penting karena pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan. Negara memiliki kegiatan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran negara dapat digolongkan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kedua-duanya dibiayai dari pendapatan negara. Pengeluaran negara dapat digolongkan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kedua-duanya dibiayai dari pendapatan negara. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi: pengeluaran untuk belanja pegawai;

pengeluaran untuk belanja barang; pengeluaran untuk subsidi daerah otonom; dan pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang. Sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pengeluaran Negara dilihat dari perusahaan Negara dalam hal ini yaitu BUMN mengeluarkan biaya untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat khususnya di provinsi bali yaitu melalui pelaksanaan kegiatan CSR untuk membantu masyarakat menyalurkan dana untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi Bali yang sedang terpuruk oleh hantaman masalah kesehatan Covid -19. Dimana dari sisi beberapa BUMN yang sudah di konfirmasi mengenai penyalura bantuan baik bantuan mendukung kesejahteraan rakyat dari sisi kesehatan maupun untuk membangkitkan kondisi perekonomian setelah *new era* setelah *covid-19*. Dalam hal program kegiatan CSR di provinsi Bali, ada beberapa BUMN yang mengikuti program CSR Award yang sudah mengkonfirmasii bentuk bantuan yang disalurkan ke masyarakat dengan jumlah yang lumayan tinggi dari data yang diberikan kepada DPD Bali yang terkonfirmasi di tahun 2020 rata rata sekitar 4 milyar dan di tahun 2021 sudah ada yang menkonfirmasi sekitar 800 juta rupiah, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari sisi jumlah BUMN

yang ada di Bali mengalami penurunan dalam menyalurkan dana dikarenakan hantaman situasi Covid-19 yang membuat kebanyakan perusahaan tidak mendapatkan profit dari usahanya karena pertumbuhan ekonomi yang mengalami resesi dan disamping itu dari sisi pendapatan provinsi bali lebih banyak dari sector pariwisata yang dengan kebijakan yang dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 menghambat geraknya perjalanan wisata atau traveler yang ingin berwisata ke Bali. Le karna itu ha yang sangat mempengaruhi jumlah pendapatan serta saluran bantuan namun BUMN di Bali masih teta melakukan CSR untuk membantu masyarakat dalam kuantitas yang sudah pasti menurun karen kita semua menyadari dengan keadaan yang sulit seperti sekarang ini dan dalam hal ini kita tetap harus bangkit berjuang untuk berkiprah di sector lain untuk mengcover kebutuhan primier hidu masing masing baikpersonal maupun dari sis perusahaan, disamping itu banyak juga bantuan dari pemerintah seperti contoh menggerakan UMKM dan pemberian bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai dan juga BPJS untuk mengcover kesehatan masyarakat dengan mengacu kesejahteraan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa sekarang ini bak daam jumlah kecil atau besar masih saja ada pihak pihak ato perusahaan perusahaan yang mau berbagi dalam

meningkatkan kesejahteraan dan ada saja baik perorangan maupun perusahaan yang mau berbagi khususnya untuk membantu sesama yang baik yang tertimpa bencana alam, masalah kesehatan bahkan dalam peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini BUMN di Bali yang masih menyalurkan dana untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat melalui program CSR sekitar 23 BUMN di provinsi Bali yang termasuk dalam kategori lembaga penyumbang diantaranya yaitu PT. Jasindo, PT. Askrindo, PT. Secufindo, PT. ITDC, PT. Pertani, Perum Bulog, PT. Angkasa Pura I, PT. Kimia Farma, PT ASDP, PT. Bank Mandiri, PT. The Patra Bali, PT. Jasa marga Bali Tol dan yang akan segera mengkonfirmasi yaitu PT. Bank BRI, PT. Bank BNI, PT. POS Indonesia, PT. PELINDO, PT. Pegadaian, PT. Garuda Indonesia, PT. PERTAMINA, PT. PLN, PT. TASPEN, PT. BANK BTN dan PT. Telkom Indonesia. List daftar perusahaan BUMN tersebut diatas mengnfirmasi sudah memberikan sumbang sih dalam program CSR yang sudah dilaksanakan dan yang akan segera di planningkan untuk kedepannya. Dari pemaparan diatas semua bentuk bantuan yang dilaksanakan khususnya BUMN yang ada diprovinsi bali bertujuan dan berkontribusi selain bertujuan untuk internal perusahaan khususnya image yang masuk dalam strategi jangka panjang perusahaan dan secara umum untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang

mengacu kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan

Dalam kamus Bahasa Indonesia (2011: 347) mengemukakan sejahtera adalah tenteram, selamat sentosa, senang, sedangkan dalam sumber lain menyebutkan, sejahtera dalam arti umum menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kehidupan bermasyarakat kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh perseorangan serta keluarga dalam masyarakat. Menurut Badrudin (2021) teori kesejahteraan di klasifikasikan menjadi 3 tiga yaitu: classical utilitarium, neoclassical welfare theory dan new contraction approach yang lebih menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Kemudian ditegaskan lagi menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan

sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (social status)

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di sebutkan bahwa, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah ,mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,memiliki hubungan yang baik, sepemikiran ,selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antarwaktu dan perbandingannya antar provinsi maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal serta fasilitas yang dimiliki kesehatan anggota

keluarga dan tingkat pendidikan angama

Menurut laporan BPS Provinsi Bali untuk Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di bali yaitu: Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya.

1. Kependudukan

Dalam laporan publikasi BPS tahun 2020 disebutkan sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, problematika kependudukan menjadi suatu isu yang selalu menarik untuk selalu diperbincangkan. Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki keberagaman yang tinggi (budaya, sumber daya alam, ras, agama, suku bangsa dsb), menyisakan permasalahan persebaran penduduk yang tidak merata. Selain itu, mengutip pernyataan dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (2004) karya Nommy Horas Thombang Siahaan, perkembangan jumlah penduduk negara-negara di dunia khususnya negara-negara sedang berkembang selama dasawarsa terakhir ini terasa sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya, pemerintah khususnya Presiden melalui pidato “Visi Indonesia” pada 14 Juli 2019, memprioritaskan pembangunan ke depan adalah pembangunan SDM yang unggul dan dipercaya

2. Kesehatan Gizi

Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia. Oleh karenanya,

setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan. Pemerintah dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 mencatatkan bahwa setiap orang wajib mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Selain itu, hidup sehat juga menjadi salah satu syarat utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan pada tatanan dunia global, arti kesehatan menjadi salah satu rumusan penting dalam rencana aksi Sustainable Development Goals (SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Tercatat sebagai tujuan ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, berbagai upaya telah ditetapkan dalam beberapa target. Di antaranya, penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta meningkatkan cakupan kesehatan universal.

Selain berobat jalan, terdapat pula sebagian penduduk yang harus dirawat inap karena keluhan kesehatan yang dialami. Hasil Susenas tahun 2019 di Provinsi Bali menunjukkan sekitar 4,25 persen penduduk pernah dirawat inap. Dirinci menurut jenis kelamin, penduduk perempuan tercatat lebih banyak yang dirawat inap dibandingkan laki-laki, dengan jumlah masing-masing 5,27 persen dan 3,25 persen. Menurut tempat

rawat inap, tercatat paling banyak di RS swasta (50,85%) dan RS pemerintah (43,32%). Hanya sebagian kecil yang dirawat inap di Puskesmas/Pustu (3,07%), praktek dokter/bidan (2,00%) dan klinik/praktek dokter bersama (1,87%)

3. Pendidikan

Salah satu indikator yang kiranya bisa mengukur kualitas pelayanan pendidikan adalah jumlah fasilitas sekolah yang telah dibangun. Semakin banyak fasilitas yang tersedia nampaknya dapat menggambarkan pelayanan pendidikan dari sisi infrastruktur yang semakin memadai. Dengan harapan jumlah sekolah yang memadai, tujuan pendidikan yang inklusif dan merata yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kiranya bisa diraih. Berdasarkan periode tahun ajaran selama dua tahun terakhir (2018/2019 s.d. 2019/2020), sebagian besar jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan mengalami penurunan. Hanya jenjang pendidikan SMK yang mengalami peningkatan. Penurunan jumlah sekolah tertinggi tercatat pada jenjang pendidikan TK yang mencapai 9 fasilitas. Penurunan tertinggi selanjutnya tercatat pada jenjang pendidikan SMP yang tercatat sebesar 8 fasilitas. Sementara itu, jumlah sekolah jenjang pendidikan SMK tercatat meningkat 13 fasilitas dibandingkan tahun ajaran sebelumnya

4. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan muncul dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan pencari kerja. Penyelesaiannya pun diperlukan kebijakan yang kompleks, seperti misalnya, tak hanya memikirkan tenaga kerja tak terdidik, namun juga memikirkan permasalahan tenaga kerja terdidik. Keterbatasan daya serap perekonomian terhadap angkatan kerja menjadi persoalan khusus yang dihadapi hampir semua wilayah di dunia tak terkecuali Bali. Bali sebagai daerah pariwisata merupakan salah satu daya tarik pencari kerja karena nilai tambah yang dihasilkan sektor ini cukup menjanjikan. Dalam kaitannya mengukur kinerja pembangunan dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah memakai standar internasional yaitu mengacu pada penduduk usia 15 tahun ke atas. Pengelompokan penduduk tersebut sebagai indikator pengukur ketenagakerjaan dikarenakan penduduk usia 15 tahun ke atas dianggap telah siap terlibat dalam ekonomi.

5. Taraf dan Pola Konsumsi

Taraf dan pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dari indikator ini, kiranya dapat menggambarkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar atau dengan istilah lain memiliki kaitan erat dengan kemiskinan. Hal ini tentunya menjadi isu yang penting karena tercantum dalam tujuan pertama Sustainable

Development Goals (SDG's) yaitu mengeliminasi kemiskinan dalam berbagai bentuk di wilayah manapun. Taraf dan pola konsumsi penduduk atau bahkan masing-masing rumah tangga berbeda-beda. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain: tingkat pendapatan, tingkat pendidikan/pengetahuan, kondisi tempat tinggal, jenis pekerjaan, tingkat peradaban bangsa, selera yang sedang berkembang di masyarakat, kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat, serta tinggi rendahnya harga barang dan jasa di suatu wilayah. Oleh karena itu, taraf dan pola konsumsi penduduk menjadi indikator yang sangat menarik karena dapat memberikan gambaran berkaitan dengan banyak aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

6. Perumahan dan Lingkungan

Perumahan merupakan kumpulan rumah baik di perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah atau papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia setelah kebutuhan sandang dan pangan, berkembang sebagai instrumen investasi berupa properti. Terutama untuk wilayah Bali sendiri

merupakan daerah dengan harga rumah/properti yang cukup tinggi. Wilayah Bali yang relatif kecil dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan sebagai destinasi wisata dunia menyebabkan demand akan rumah/properti meningkat lebih tinggi dari supply yang tersedia. Hal ini mendorong tingginya harga. Di sisi lain, keterbatasan supply perumahan dapat memunculkan permasalahan terkait kesejahteraan rakyat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan rumah tinggal yang layak huni.

7. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menjadi tolok ukur utama kesejahteraan penduduk, semakin tinggi kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin memburuk dan semakin rendah kemiskinan mencerminkan kesejahteraan yang semakin membaik. Kemiskinan yang dihitung BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan

kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah bersangkutan. Akan tetapi terkadang pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu metode yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang terjadi adalah metode Head Count Index. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, maka terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinannya.

Berdasarkan indikator kesejahteraan diatas apabila suatu daerah sudah dapat memenuhi maka kesejahteraan secara makro sudah bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat. Dalam teori ekonomi terdapat model pertumbuhan yang memprediksikan perubahan ekonomi atas dasar variable-variabel ekonomi seperti tingkat tabungan dan investasi, penawaran tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, dan perdagangan atau ekspor. Pertumbuhan ekonomi adalah hasil atau akibat dari perubahan-perubahan formasi permodalan, input tenaga kerja, dan berbagai unsur lain yang menyangkut perubahan produktifitas. Bila konsep pertumbuhan ekonomi dipandang dari sudut yang lebih luas, faktor-faktor lainnya akan terangkum seperti variable-variabel sosial yang mengukur struktur industri, perubahan populasi dan

kesempatan pendidikan. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipahami melalui pendekatan teoritis-konseptual maupun yuridis-kontekstual.

Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial berakarkan pembangunan sosial dan berpusatkan pada rakyat. Dalam konteks Pembangunan

Nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan kesejahteraan rakyat selaras dengan konsepsi pembangunan sosial, yang dalam literature mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Oleh karena itu, di Indonesia pembangunan kesejahteraan sosial memiliki akar baik secara teoritis-konseptual, yaitu pembangunan sosial berpusatkan pada rakyat, maupun yuridis-kontekstual yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat

BAB III

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak BUMN dimana mengacu pada peranan BUMN sebagai lembaga perusahaan negara yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan CSR dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dan konsep kesejahteraan Masyarakat yang mengacu pada UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Lembaga lembaga BUMN terdapat sekitar 23 perusahaan yang telah memberikan konfirmasi dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam program CSR Award yang di prakarsai oleh Senator DPD Bali dimana bertujuan menapresiasi dan memotivasi lembaga BUMN untuk berkontribusi dalam pelaksanaan CSR untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, pelestarian lingkungan yang kemungkinan terdapat dampak negative dikarenakan aktivitas perusahaan.

Kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi walaupun tidak terlalu signifikan dikarenakan isu virus covid 19 saat ini, namun ada pergerakan perekonomian sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok khususnya bagi masyarakat yang terdampak terhadap situasi pariwisata yang belum normal saat ini di provinsi Bali. Dengan dilaksanakannya CSR diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan dari sisi perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang mengacu pada *sustainability* atau berkelanjutan. Disini terdapat juga peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang

mewajibkan kegiatan CSR bagi perusahaan khususnya BUMN. Peranan BUMN, Kegiatan CSR, BUMN CSR Award dan Kesejahteraan Masyarakat. Dapat disintesakan bahwa terdapat pengaruh Antara peran BUMN CSR serta CSR Award terhadap kesejahteraan Masyarakat. Begitu juga dengan kebijakan yang tertuang dalam undang undang yang ewajibkan BUMN melaksanakan program CSR yang didukung juga oleh CSR Award program yang di gagas ole DPDRI untuk meningkatkan kesadaran BUMN untuk melaksanakan CSR yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, kelestarian lingkungan dan perekonomian untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif maka untuk membuat kajian tentang Peranan BUMN CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Dimana peranan pemerintah yang tertuang dalam amanat undang undang dapat menstimulus keinginan lembaga BUMN untuk melaksanakan program Coorporate Social Responsibility (CSR) yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat di provinsi Bali. Dalam penelitian ini ingin dibuktikan sejauhmana Corporate Responsible yang dilaksanakan BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali yang mencakup dalam ekonomi,

pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Peranan BUMN CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Bali,

IV. SARAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari implementasi CSR, ada beberapa saran yang bisa diberikan yaitu:

- 1) BUMN disarankan lebih aktif melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan bantuan
- 2) BUMN berkoordinasi dengan masyarakat dalam pengembangan industri kreatif terutama desa-desa terpencil

sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap sosial dan lingkungan.

- 3) Meningkatkan intensitas sosialisasi terkait dengan program CSR kepada masyarakat luas karena sebagian tidak semua masyarakat mengerti dengan program program CSR yang direncanakan dan akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://money.kompas.com/read/2021/08/22/104901326/csr-adalah-singkatan-dari-corporate-social-responsibility-apa-itu>.
Adewale, Aregbeshola dan Radebe Sarah. 2012. The Impact Of Corporate Social Responsibility On The Profitability Of Listed Retailers: Indication From The Johannesburg

- Security Exchange (JSE). African Journal of Business Management. 6(4). pp: 1694-1701.*
- Amich Alhumani, 2007. Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan, dalam Kompas, tanggal 27 Desember.
- Andi Seruji, 2011. "Kolom Ekonomi Politik Orang Miskin," dalam Kompas, tanggal 29 Januari.
- Didik Rachbini, 2010, Kemiskinan dan Politik Ekonomi, dalam Media Indonesia, tanggal 12 Januari.
- Justika S.Baharsyah, 1999. Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial Pelajaran Dari Krisis. Jakarta: Departemen Sosial.
- Lipset SM, 1991. "Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi," dalam Arus Pemikiran Ekonomi Politik (Amir Effendi, Ed), 1991. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mancur Olson. Jr, 1991. "Pertumbuhan Cepat Sebagai Kekuatan Destabilisasi", dalam Arus Pemikiran Ekonomi Politik, Amir Effendi Siregar, Ed, 1991. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jan-Eric Lane dan Svante Ersson, 1994. Ekonomi Politik Komparatif, Jakarta: Raja Grasindo Prasada.
- Saifur Rohman, 2011. Memaknai Ekonomi Tiwul, dalam Kompas, tanggal 8 Januari.
- <https://www.yumpu.com/id/document/view/36685215/bps-provinsi-bali-badan-pusat-statistik>
- Ackerman, R.W. 1973. How Companies Respond to Social Demands. Harvard University Review 51(4), hal. 88-98.
- Alford, H. & Naughton, M. 2002. *Beyond the Shareholder Model of the Firm: Working toward the Common Good of a Business*, in S.A. Cortright and M. Naughton (Eds) *Rethinking the purpose of Business. Interdisciplinary Essays from the Catholic Social Tradition*. Notre Dame: Notre Dame University Press.
- Cassel, D. 2001. *Human Rights Business Responsibilities in the Global Marketplace. Business Ethics Quarterly 11(2)*, hal. 261-274.
- Donaldson, T. & Dunfee, T.W. 1994. *Towards a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory. Academy of Management Review 19*, hal. 252-284.
- Donaldson, T. & Preston, L.E. 1995. *The Stakeholder theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications. Academy of Management Review 20(1)*, hal. 65-91.
- Davis, K. 1960. *Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities? California Management Review 2*, hal. 70-76.
- Friedman, M. 1970. *The Social Responsibility of Business is to increase its profits. New York Times Magazine, September 13th*, pp. 32-33, 122, 126.